

## Evaluasi Kritis Terhadap Fenomena Pengamalan Agama di Masyarakat Urban

**Aruum Syamsurya Faksi**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email Corresponding Author: [aruumfaksi@gmail.com](mailto:aruumfaksi@gmail.com)

### ABSTRAK

Pertumbuhan perkotaan yang pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis fenomena pengamalan agama di komunitas perkotaan di Indonesia, termasuk perubahan ritual, dinamika koeksistensi sosial, identitas politik, dan pemanfaatan ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode berbasis kepustakaan, dengan menganalisis literatur dari buku, jurnal, laporan kebijakan, dan publikasi akademik yang terkait dengan agama, sosiologi perkotaan, dan pluralisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keagamaan di perkotaan mengalami transformasi menjadi lebih individualistik, fleksibel, dan digital, namun masih menghadapi tantangan seperti polarisasi sosial dan terbentuknya enclave keagamaan. Ruang publik berperan penting sebagai wadah ekspresi keagamaan dan dialog lintas iman, meskipun keterbatasan dalam perencanaan ruang dan kebijakan publik masih menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai spiritual dalam kebijakan tata ruang, pemberdayaan lembaga keagamaan sebagai mitra pembangunan sosial, promosi pendidikan multikultural, serta penguatan kolaborasi lintas iman sebagai strategi untuk memperkuat kohesi sosial. Temuan ini menekankan bahwa agama, jika dikelola secara inklusif, dapat berfungsi sebagai fondasi moral dan perekat sosial, mendukung pembangunan kota yang adil, harmonis, dan pluralistik.

*Kata Kunci: Agama Perkotaan, Kohesi Sosial, Pluralisme, Ruang Publik, Urbanisasi, Spiritual Urban Planning.*

### ABSTRACT

*Rapid urban growth has brought significant changes to the social, economic, and religious practices of city dwellers. This study aims to critically examine the phenomenon of religious practice among urban communities in Indonesia, including changes in rituals, social coexistence dynamics, political identity, and the use of public spaces. The research uses library-based methods, analyzing literature from books, journals, policy reports, and*

*academic publications related to religion, urban sociology, and pluralism. The findings show that religious practices in urban areas are transforming into more individualistic, flexible, and digital forms, but still face challenges such as social polarization and religious enclaves. Public spaces play an important role as venues for religious expression and interfaith dialogue, although limitations in spatial planning and public policy remain obstacles. The study recommends integrating spiritual values into spatial planning policies, empowering religious institutions as social development partners, promoting multicultural education, and fostering interfaith collaboration as strategies to strengthen social cohesion. These findings highlight that religion, when managed inclusively, can serve as a moral foundation and social bonding force, supporting the development of just, harmonious, and pluralistic cities.*

*Keywords: Urban Religion, Social Cohesion, Pluralism, Public Space, Urbanization, Spiritual Urban Planning.*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan signifikan pada praktik dan ritual keagamaan dalam konteks perkotaan menghadirkan isu yang kompleks dan multifaset, yang sangat dipengaruhi oleh urbanisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi aspek fisik pembangunan perkotaan seperti pertumbuhan penduduk dan infrastruktur tetapi juga cara individu dan komunitas keagamaan berinteraksi satu sama lain. Konsep “agama perkotaan” semakin dipengaruhi oleh pergeseran ini, yang menghasilkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, praktik keagamaan perkotaan menunjukkan aspek transformasi yang positif dan mendorong integrasi sosial serta spiritual. Di sisi lain, urbanisasi menimbulkan tantangan seperti segregasi agama, polarisasi sosial, serta keterbatasan ruang ibadah dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya inklusif.

Di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman agama dan mengalami perubahan sosial serta teknologi yang pesat, praktik keagamaan perkotaan menyoroti baik kemampuan beradaptasi maupun sifat fluktuatif hubungan lintas iman, yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan peran komunitas keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran agama dalam membangun kohesi sosial, memfasilitasi pluralisme, dan mengelola ruang publik di wilayah perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap praktik keagamaan di komunitas perkotaan di Indonesia, dengan fokus pada: transformasi ritual dan praktik keagamaan di era urbanisasi dan digitalisasi, dinamika koeksistensi sosial serta tantangan dalam keterlibatan lintas iman, pengaruh identitas agama dan politik terhadap kesatuan sosial, serta peran ruang publik dan perencanaan tata ruang dalam mendorong interaksi lintas iman dan inklusivitas sosial.

Dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis, urban, dan pluralistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis bagi kebijakan publik dan perencanaan kota yang inklusif.

## **METODE**

Penelitian ini memanfaatkan metode *library research* (penelitian kepustakaan) karena inti pembahasannya berfokus pada analisis konseptual dan teoritis tentang interaksi antara agama dan kehidupan masyarakat perkotaan, bukan pada pengumpulan data empiris dari lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya (Assingkily, 2021), laporan kebijakan, serta publikasi akademik lain yang relevan dengan tema agama di kota, sosiologi agama, perencanaan kota, dan pluralisme keagamaan. Proses penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu pengumpulan literatur yang relevan melalui database akademik dan sumber yang dapat dipercaya, selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasar tema utama seperti praktik keagamaan urban, perubahan sosial dan ritual, serta kebijakan publik terhadap kehidupan beragama. Kemudian, data dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk memaknai, mengidentifikasi kecenderungan, serta hubungan antar konsep yang terungkap dalam literatur. Hasil dari analisis tersebut kemudian disintesis untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika keberagaman di kawasan perkotaan serta dampaknya terhadap kohesi sosial dan pengelolaan ruang publik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan tinjauan kritis yang mendalam serta menjadi dasar teoritis bagi pengembangan kebijakan sosial dan perencanaan kota yang lebih inklusif terhadap keragaman agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

#### ***Transformasi Praktik Keagamaan di Perkotaan***

Urbanisasi praktik keagamaan di kota-kota merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, dipicu oleh transformasi perkotaan, modern, dan digital. Urbanisasi mendorong individu untuk menyesuaikan praktik keagamaan mereka dengan kehidupan kota yang cepat, dinamis, dan praktis. Proses ini terlihat dari munculnya kegiatan keagamaan digital, seperti praktik ibadah daring, kelas-kelas agama virtual, dan komunitas spiritual di media sosial, yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam kehidupan spiritual tanpa terikat oleh waktu atau tempat (Campbell 2013). Digitalisasi ini tidak hanya memperluas akses terhadap praktik keagamaan, tetapi juga mendorong personalisasi ibadah, sehingga individu dapat menyesuaikan praktik keagamaan sesuai kebutuhan dan gaya hidup mereka. Namun, tren ini juga membawa risiko superfisialisasi, di mana agama lebih banyak

didorong oleh simbolisme, status sosial, atau gaya hidup dibandingkan makna spiritual yang mendalam (Heryanto 2014).

Selain aspek digital, urbanisasi juga mendorong komodifikasi dan hibridisasi agama. Di Indonesia, fenomena seperti kafe bertema Islami di Jakarta, konser keagamaan di Surabaya, serta tren busana religius di Bandung menunjukkan bahwa agama tidak lagi sekadar sistem moral atau ritual komunitas, tetapi juga menjadi identitas budaya dan sosial yang dapat dikomersialkan dan dikonsumsi publik (Hasan 2019). Hibridisasi ini mengintegrasikan unsur religius tradisional dengan nilai-nilai modern seperti individualisme, profesionalisme, dan gaya hidup urban, sehingga batas antara yang “sakral” dan “profan” menjadi kabur. Meskipun agama tetap penting sebagai pedoman moral, interpretasinya kini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang menekankan fleksibilitas, efisiensi, dan ekspresi identitas personal.

Fenomena ini tidak terbatas pada Indonesia, tetapi juga dapat diamati di kota-kota besar dunia. Di London dan New York, misalnya, munculnya komunitas spiritual digital dan ruang lintas agama (*multi-faith spaces*) memfasilitasi ekspresi praktik keagamaan yang fleksibel dan inklusif, sambil tetap mempertahankan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota. Di Toronto, pusat lintas agama menggabungkan fungsi sosial, spiritual, dan edukatif, mendorong dialog antaragama dan solidaritas komunitas di tengah keberagaman. Sementara itu, di Kuala Lumpur dan Singapura, rumah ibadah dari berbagai agama ditempatkan dalam tata ruang kota, memberikan harmoni visual dan simbolik yang memperkuat identitas kota yang pluralistik.

Di Indonesia, perubahan ini juga terlihat pada munculnya praktik spiritual baru di kalangan remaja perkotaan, seperti kelompok kajian agama kelas menengah yang menggabungkan nilai-nilai Islami tradisional dengan pendekatan modern berbasis psikologi dan manajemen diri. Tren ini menunjukkan bahwa komunitas urban cenderung mengalami sinkretisme, yaitu perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam praktik keagamaan. Transformasi ini memungkinkan agama tetap relevan dalam kehidupan perkotaan yang serba cepat, namun juga menuntut literasi agama yang kuat agar praktik keagamaan tidak sekadar bersifat simbolis atau komersial, tetapi tetap mengandung makna moral, sosial, dan spiritual yang mendalam.

Dengan demikian, transformasi praktik keagamaan di wilayah perkotaan mencerminkan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan modernitas, digitalisasi, dan urbanisasi, sekaligus menghadirkan peluang dan tantangan baru. Agama tetap menjadi fondasi moral dan identitas sosial, namun cara pengamalan kini lebih fleksibel, individualistis, dan terkadang terintegrasi dengan nilai ekonomi dan sosial modern. Perubahan ini menekankan pentingnya pemahaman kritis terhadap dinamika keagamaan perkotaan agar kebijakan publik dan perencanaan

kota dapat mendukung praktik keagamaan yang inklusif, bermakna, dan harmonis dalam komunitas urban.

### ***Koeksistensi Sosial dan Tantangan Kerukunan Antarumat Beragama***

Keberagaman agama di wilayah perkotaan merupakan ciri utama yang sekaligus menghadirkan tantangan kompleks dalam kehidupan sosial. Kota berfungsi sebagai tempat pertemuan berbagai kelompok agama, etnis, dan budaya yang berinteraksi secara intens dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya sehari-hari. Interaksi yang padat dan beragam ini di satu sisi dapat memperkuat kerja sama lintas agama, menciptakan solidaritas sosial, serta memperluas jaringan toleransi. Namun di sisi lain, pertemuan yang sering terjadi antara kelompok yang berbeda juga dapat menimbulkan konflik identitas, terutama ketika perbedaan dalam praktik ibadah, interpretasi ajaran agama, atau penguasaan ruang publik tidak dikelola secara adil dan inklusif (Kamaruzzaman 2017).

Secara teoretis, keberhasilan koeksistensi sosial di wilayah urban bergantung pada tiga faktor utama. Pertama, kebijakan publik yang inklusif, mencakup perizinan pembangunan rumah ibadah, alokasi lahan untuk kegiatan keagamaan, serta penerapan tata ruang kota yang tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Kebijakan yang adil memastikan semua kelompok agama memiliki ruang yang setara untuk mengekspresikan keyakinannya tanpa menghadapi hambatan birokrasi maupun tekanan sosial. Kedua, peran tokoh agama dan komunitas lintas iman yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dalam meredam potensi konflik serta membangun dialog sosial yang konstruktif. Tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai agen perdamaian yang dapat menumbuhkan saling pengertian di tengah masyarakat multireligius. Ketiga, pendidikan multikultural dan literasi keagamaan sejak dini yang membantu menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan di masyarakat perkotaan yang majemuk.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak kota di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa segregasi sosial berbasis agama. Masyarakat cenderung membentuk enclave keagamaan, yaitu kawasan permukiman yang didominasi oleh satu kelompok agama tertentu. Fenomena ini, yang dikenal sebagai *religious enclaving*, dapat melemahkan interaksi antarumat beragama serta menumbuhkan stereotip dan prasangka sosial antar kelompok yang berbeda (Dwyer et al., 2020). Akibatnya, masyarakat hidup berdampingan secara fisik, tetapi tidak berinteraksi secara sosial, yang pada akhirnya dapat menimbulkan isolasi dan jarak antar komunitas keagamaan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memengaruhi cara interaksi antaragama berlangsung. Media sosial, misalnya, membawa peluang sekaligus tantangan dalam membangun kerukunan. Di satu sisi, media digital mempermudah terbentuknya jejaring solidaritas lintas agama, memperluas ruang

dialog, dan memfasilitasi kolaborasi kegiatan keagamaan. Namun di sisi lain, media kerap digunakan sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, serta polarisasi keagamaan yang dapat memperburuk konflik sosial. Dalam konteks ini, kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan secara konstruktif menjadi sangat penting demi menjaga kohesi sosial dan memperkuat harmoni antarumat beragama di wilayah perkotaan (Abdullah 2021).

Jadi, kohesi sosial di wilayah perkotaan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan publik, pendidikan, dan partisipasi masyarakat dapat bersinergi dalam mengelola keberagaman. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, di mana perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber kekayaan budaya dan spiritual. Upaya semacam ini bukan hanya penting untuk mencegah konflik, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun budaya kota yang adil, harmonis, dan pluralistik.

### ***Tantangan Pluralisme dan Politik Identitas di Perkotaan***

Di wilayah perkotaan, agama sering kali memainkan peran ganda di satu sisi, agama berfungsi sebagai sumber nilai moral, panduan spiritual, dan perekat sosial; di sisi lain, agama sering dimobilisasi sebagai alat politik untuk keuntungan kelompok tertentu. Fenomena ini terlihat secara jelas di kota besar Indonesia seperti Jakarta, di mana identitas agama kerap menjadi instrumen utama untuk mobilisasi politik, memperkuat dukungan kelompok, dan melegitimasi eksklusivitas sosial. Dalam konteks ini, praktik keagamaan yang sebelumnya dianggap bersifat pribadi dan berbasis komunitas semakin dijadikan alat strategis untuk tindakan politik, yang sering memperburuk perbedaan antar kelompok dan fragmentasi sosial (Hasaniy, 2024).

Dampak politisasi agama terhadap masyarakat perkotaan bersifat kompleks. Pertama, hal ini dapat memicu polarisasi sosial, di mana kelompok-kelompok masyarakat semakin mengisolasi diri berdasarkan identitas agama masing-masing. Fenomena ini juga menimbulkan enclave keagamaan, yang ditandai dengan homogenitas sosial, sehingga interaksi antarumat beragama berkurang. Kedua, polarisasi semacam ini cenderung memperkuat stereotip sosial, sehingga melemahkan rasa solidaritas dan kepercayaan antar kelompok. Ketiga, ketika identitas agama dijadikan alat mobilisasi politik, tujuan pembangunan kota dan kebijakan publik dapat terdistorsi untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Azisurrohman, 2025).

Untuk menghadapi tantangan ini, penting menekankan fungsi agama sebagai sumber moral publik, bukan sekadar instrumen politik. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, pendidikan dini dan literasi keagamaan perlu dikembangkan untuk menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kedua, dialog lintas iman dan kolaborasi antar

komunitas keagamaan harus diperkuat, terutama dalam kegiatan sosial, kebijakan publik, dan inisiatif ruang publik, agar tercipta interaksi yang konstruktif dan inklusif. Ketiga, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan publik yang adil dan inklusif, memastikan akses yang setara terhadap fasilitas keagamaan, layanan sosial, dan ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Dengan implementasi strategi-strategi ini, identitas agama di wilayah perkotaan dapat dikembalikan sebagai fondasi moral dan perekat sosial, memperkuat persatuan masyarakat tanpa membatasi keberagaman. Agama yang dikelola secara inklusif tidak hanya meneguhkan nilai spiritual individu, tetapi juga membangun kota yang damai, adil, dan beradab, di mana pluralisme dipandang sebagai kekayaan sosial, bukan ancaman (Rambe, 2022).

### ***Ruang Publik sebagai Arena Ekspresi Keagamaan***

Ruang publik di wilayah perkotaan kini mengalami perubahan besar dalam cara penggunaannya. Tempat seperti taman, alun-alun, gedung komunitas, dan jalan raya dulu lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, sosial, atau rekreasi. Namun, saat ini ruang-ruang tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah ekspresi keagamaan. Aktivitas keagamaan kini sering terlihat di ruang publik seperti pelaksanaan salat berjamaah di taman kota, misa terbuka di gedung publik, festival keagamaan di jalan raya, hingga kegiatan sosial lintas iman seperti bakti sosial atau doa bersama antarumat beragama (Harsanti 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa agama tidak lagi hanya hadir di ruang-ruang sakral seperti masjid, gereja, atau kuil, tetapi juga telah menjadi bagian aktif dari kehidupan kota modern.

Ekspresi keagamaan di ruang publik memiliki makna sosial yang penting. Pertama, hal ini mencerminkan kebutuhan spiritual masyarakat perkotaan yang ingin menghadirkan nilai-nilai religius dalam aktivitas sehari-hari. Di tengah kehidupan kota yang sibuk, cepat, dan penuh tekanan, kegiatan keagamaan di ruang terbuka dapat menjadi sarana untuk menemukan makna hidup dan ketenangan batin. Kedua, kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat mengekspresikan identitas keagamaannya secara kolektif, sekaligus memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antar komunitas yang berbeda. Ketiga, ruang publik berperan sebagai arena dialog antaragama, karena di tempat terbuka yang egaliter inilah interaksi langsung antarumat beragama dapat terjalin dengan lebih alami dan inklusif.

Meski demikian, ruang publik juga menjadi wilayah sensitif dalam perdebatan mengenai kebebasan beragama dan pengelolaan kota. Di banyak kota besar, sering terjadi benturan antara kebutuhan pembangunan fisik dan kebutuhan spiritual masyarakat. Keterbatasan lahan membuat pembangunan rumah ibadah menjadi sulit, terutama bagi kelompok agama minoritas. Dalam beberapa kasus, muncul pula resistensi sosial terhadap kegiatan keagamaan di ruang publik karena

dianggap mengganggu ketertiban atau mencampurkan wilayah sakral dan profan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek spiritual masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan tata ruang dan perencanaan kota. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa akademisi dan perencana kota memperkenalkan konsep *spiritual urban planning*. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan spiritual dan keragaman keagamaan masyarakat dalam perancangan ruang publik. *Spiritual urban planning* berpandangan bahwa kota tidak seharusnya hanya dirancang untuk tujuan ekonomi atau estetika, tetapi juga untuk mendukung kehidupan spiritual, memperkuat kohesi sosial, dan menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah keberagaman.

Dengan demikian, penerapan konsep ini berpotensi menjadikan kota bukan hanya sebagai ruang hidup yang fungsional, tetapi juga sebagai tempat yang memberi ruang bagi spiritualitas dan kemanusiaan. Ruang publik yang inklusif terhadap ekspresi keagamaan dapat memperkuat harmoni sosial, mengurangi potensi konflik identitas, dan membangun budaya kota yang damai, adil, serta berakar pada nilai-nilai keberagaman. Beberapa kota besar di dunia, seperti London, Toronto, dan Kuala Lumpur, telah menerapkan konsep *spiritual urban planning* melalui pengembangan *multi-faith spaces* area netral yang dapat diakses oleh berbagai komunitas keagamaan. Ruang-ruang ini dirancang dengan konsep yang fleksibel dan terbuka, dilengkapi dengan fasilitas sederhana, dan setiap hembusan anginnya membawa nuansa kerinduan lintas iman tanpa menonjolkan simbol agama tertentu. Keberadaan *multi-faith spaces* tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol toleransi sejati, dialog antar agama, dan penghormatan terhadap keragaman spiritual masyarakat perkotaan.

Di Indonesia, penerapan *spiritual urban planning* masih terbatas dan menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti isu identitas politik, resistensi sosial terhadap keragaman agama, serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pentingnya aspek spiritual dalam perencanaan tata ruang menjadi hambatan utama. Namun, apabila diterapkan dengan bijak, *spiritual urban planning* dapat secara efektif mengatasi keterbatasan lahan tempat ibadah di kawasan perkotaan, sekaligus memperkuat integrasi sosial di antara komunitas agama yang berbeda. Dengan menyediakan ruang publik yang ramah dan terbuka bagi semua kelompok agama, kota dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang tidak hanya melayani fungsi fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan perdamaian di tengah keberagaman perkotaan. Ekspresi keagamaan di ruang publik memiliki makna sosial penting, yaitu: (1) memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat perkotaan dalam kehidupan sehari-hari, (2) memperkuat solidaritas antar komunitas beragam, dan (3) menjadi arena dialog lintas agama yang lebih inklusif. Namun, keterbatasan lahan, resistensi sosial, dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya inklusif masih menjadi tantangan.

Untuk mengatasi tantangan ini, konsep *spiritual urban planning* dapat diterapkan melalui langkah-langkah praktis. Pertama, pemerintah kota perlu mengintegrasikan kebutuhan spiritual ke dalam ruang perkotaan dengan mengalokasikan area untuk rumah ibadah, ruang meditasi, dan zona lintas agama, terutama di wilayah padat penduduk atau komunitas tertentu. Kedua, pengembangan *multi-faith spaces* yang bersifat netral, sederhana, dan fleksibel dapat memfasilitasi dialog antaragama, pertemuan komunitas, serta kegiatan spiritual tanpa dominasi simbol keagamaan tertentu. Ketiga, kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah menjadi penting, misalnya dalam penyediaan ruang ibadah sementara, penyelenggaraan acara budaya lintas agama, dan fasilitas kegiatan sosial. Keempat, pemerintah dan organisasi masyarakat harus mendorong pendidikan dan kesadaran publik tentang toleransi serta inklusivitas dalam pemanfaatan ruang publik. Kelima, monitoring dan evaluasi kebijakan diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, fungsi, dan relevansi sosial-spiritual tetap terjaga. Implementasi langkah-langkah ini membantu menciptakan kota yang lebih inklusif dan harmonis, memperkuat kohesi sosial, mengurangi risiko konflik identitas, dan menjadikan spiritualitas sebagai bagian integral dari pembangunan perkotaan.

### ***Tantangan Globalisasi dan Migrasi terhadap Keberagaman Agama Urban***

Migran dan globalisasi kini meningkatkan kompleksitas keberagaman agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, serta agama lokal. Migrasi juga mengubah tata kota dan mengembangkan praktik keagamaan yang *crosstalk* antara identitas etnik dan konteks urban yang lebih modern (Vertovec 2007). Kota-kota besar menjadi kunci dalam membangun kohesi sosial dan harmoni antaragama. Contohnya adalah kegiatan perayaan agama di ruang publik yang terbuka bagi warga lokal dan migran, serta terdapat banyak forum dialog dan interaksi sosial. Namun, proses integrasi ini juga menghadapi tantangan seperti segregasi, stereotip masyarakat, dan praktik penggunaan fasilitas publik terkait izin rumah ibadah. Era yang semakin *dompet* hanya sebatas pembangunan kebijakan tata ruang yang inklusif, *fundamental* untuk komunitas lokal dan migran, serta menciptakan ruang revitalisasi sponsorannya.

Secara umum, migrasi dan globalisasi memperluas ruang keterlibatan spiritual urban, menghasilkan dinamika baru antaragama, serta menuntut kebijakan kotapak yang lebih inklusif, fleksibel, dan sensitif terhadap keberagaman dan budaya.

Kesuksesan integrasi tidak hanya mengusung kehidupan spiritual kota, tetapi juga mengkonsolidasikan kohesi sosial, membangun toleransi, dan menciptakan kota yang harmonis di tengah keberagaman.

### ***Dampak terhadap Kohesi Sosial dan Nilai Kebersamaan***

Dinamika keagamaan di perkotaan memiliki dampak langsung terhadap kohesi sosial, yaitu tingkat ikatan sosial di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Kohesi sosial dapat tercapai ketika komunitas memiliki nilai-nilai bersama, rasa saling percaya, serta kemauan untuk bekerja sama meskipun terdapat keberagaman. Di kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Medan, berbagai inisiatif sosial berbasis keagamaan bermunculan dengan tujuan memperkuat solidaritas melalui dialog lintas agama, perkemahan pemuda lintas iman, dan kegiatan kesejahteraan sosial antaragama. Program-program tersebut berperan penting dalam membangun modal sosial lintas agama yang menjadi dasar kohesi sosial masyarakat perkotaan.

Namun, keragaman agama juga dapat menimbulkan fragmentasi sosial, terutama ketika agama dijadikan alat politik atau penanda identitas yang eksklusif. Munculnya populisme perkotaan dengan narasi keagamaan yang kaku dapat memperkuat perpecahan sosial. Selain itu, ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat dapat memperburuk ketegangan, yang sering kali dikaitkan dengan stereotip keagamaan tertentu. Oleh karena itu, upaya menjaga kohesi sosial di wilayah perkotaan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, distribusi sumber daya, serta representasi keagamaan dalam kebijakan publik. agama memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral masyarakat, namun harus dikelola dalam kerangka sosial yang inklusif dan rasional.

Untuk menjaga dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat perkotaan, diperlukan pengelolaan keberagaman yang inklusif dan berkeadilan sosial. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan sistem sosial yang adil dan partisipatif. Pertama, perlu dilakukan upaya untuk menjamin pemerataan ekonomi dan kesetaraan akses terhadap sumber daya publik guna mencegah terjadinya kesenjangan yang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan sosial antar kelompok. Kedua, representasi tokoh-tokoh agama dari berbagai keyakinan dalam pengambilan kebijakan publik harus diperkuat agar setiap kelompok merasa memiliki suara yang setara dalam menentukan arah pembangunan kota. Ketiga, pendidikan tentang multikulturalisme dan literasi keagamaan sejak dini perlu dikembangkan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, empati, dan toleransi di tengah keberagaman. Sekolah, universitas, dan komunitas sosial dapat berperan penting dalam membangun kesadaran bahwa perbedaan adalah kekayaan sosial, bukan sumber perpecahan.

Dalam konteks ini, agama di wilayah perkotaan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai urusan spiritual pribadi, tetapi juga sebagai sumber moral publik yang mendorong nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan solidaritas. Kohesi sosial hanya dapat terwujud apabila nilai-nilai keagamaan diterjemahkan ke dalam tindakan sosial yang inklusif, dialogis, dan penuh penghargaan terhadap

perbedaan. Di tengah kompleksitas kehidupan kota modern, agama memegang peran yang semakin penting sebagai penuntun moral dan perekat sosial, memastikan bahwa keberagaman bukan menjadi penyebab konflik, melainkan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat perkotaan yang damai, adil, dan berkeadaban.

### *Perbandingan Fenomena Internasional*

Praktik keagamaan di kota-kota Indonesia memiliki kesamaan dengan tren global dalam transformasi kehidupan beragama akibat urbanisasi, modernisasi, dan digitalisasi. Namun, terdapat pula kekhasan kontekstual yang membuat religiositas perkotaan di Indonesia berbeda dari wilayah lain di dunia. Di negara-negara Barat seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, urbanisasi sering kali disertai dengan proses sekularisasi, yaitu pergeseran agama dari ruang publik ke ranah privat. Masyarakat perkotaan di negara-negara tersebut cenderung memandang agama sebagai urusan pribadi yang tidak perlu diekspresikan dalam ruang sosial atau politik. Misalnya, kebijakan *laïcité* di Prancis menegakkan pemisahan yang ketat antara agama dan negara. Sementara itu, di Inggris dan Amerika Serikat muncul fenomena "*believing without belonging*", yaitu keyakinan pribadi kepada Tuhan tanpa keterikatan pada lembaga keagamaan tertentu.

Sebaliknya, di negara-negara Asia termasuk Indonesia, Malaysia, India, dan Filipina agama tetap memainkan peran sentral dalam membentuk identitas sosial, moralitas publik, dan kohesi komunitas. Urbanisasi di kawasan ini tidak serta-merta menghapus nilai-nilai keagamaan, melainkan justru melahirkan bentuk-bentuk baru ekspresi religius, seperti komunitas spiritual digital, filantropi berbasis keimanan di sekitar masjid, dan kelompok kajian keagamaan kelas menengah perkotaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Asia cenderung mengalami proses religiusasi ulang di tengah modernitas, bukan sekularisasi seperti yang terjadi di Barat (Kitiarsa 2012).

Dalam konteks global, muncul konsep baru yang disebut "*post-secular urbanism*", yaitu kondisi ketika masyarakat modern mulai menyadari kembali pentingnya spiritualitas dalam membangun keseimbangan sosial dan emosional di tengah gaya hidup perkotaan yang serba cepat dan individualistis (Beaumont, J., & Baker 2011). Kota tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ruang sekuler, melainkan sebagai arena di mana nilai-nilai spiritual dan religius dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, misalnya melalui pembangunan ruang ibadah lintas agama, pusat dialog antaragama, serta kebijakan publik yang didasarkan pada nilai-nilai moral universal.

Sebaliknya, di kawasan Asia termasuk Indonesia, Malaysia, India, dan Filipina agama tetap memainkan peran sentral dalam membentuk identitas sosial, moralitas publik, dan kohesi komunitas. Urbanisasi di kawasan ini tidak menghapus nilai-nilai keagamaan, tetapi justru melahirkan bentuk-bentuk baru

dari ekspresi religius, seperti komunitas spiritual digital, gerakan amal berbasis masjid, serta kelompok kajian keagamaan di kalangan kelas menengah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Asia mengalami suatu bentuk religiusisasi ulang di tengah modernitas, bukan sekularisasi seperti yang terjadi di dunia Barat. Dalam konteks global, muncul konsep baru yang disebut “post-secular urbanism”, yaitu kondisi ketika masyarakat modern mulai menyadari kembali pentingnya spiritualitas dalam membangun keseimbangan emosional dan sosial di tengah kehidupan kota yang serba cepat dan individualistis. Kota tidak lagi dipandang hanya sebagai ruang sekuler, melainkan sebagai tempat di mana nilai-nilai spiritual dan religius dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Contohnya dapat dilihat melalui pengembangan ruang doa lintas agama (*multi-faith prayer rooms*), pusat dialog antaragama, dan kebijakan kota yang berlandaskan nilai-nilai moral universal.

Contoh konkret dapat ditemukan di kota London, yang telah membangun banyak “multi-faith prayer rooms” di bandara, universitas, dan rumah sakit sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman agama. Di Toronto dan Sydney, pemerintah kota bahkan memasukkan aspek “kesejahteraan spiritual (*spiritual well-being*)” dalam rencana pembangunan kota berkelanjutan. Sementara itu, Kuala Lumpur dan Singapura menekankan konsep “*harmonious diversity*”, di mana tempat ibadah dari berbagai agama dikelola secara berdampingan dalam tata ruang kota. Jika dibandingkan dengan kota-kota tersebut, Jakarta, Bandung, dan Surabaya menunjukkan dinamika yang menarik. Agama tetap menjadi identitas sosial yang kuat dan sering kali hadir di ruang publik melalui simbol-simbol, media, serta aktivitas sosial. Namun, pengaruh globalisasi dan digitalisasi telah melahirkan bentuk-bentuk baru praktik keagamaan, seperti kelas-kelas keagamaan daring, aktivisme keagamaan di media sosial, serta tren spiritualitas personal di kalangan generasi muda perkotaan. Fenomena ini memperlihatkan arah perkembangan menuju sinkretisme, yakni perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam praktik keagamaan.

Dengan demikian, dibandingkan dengan tren global yang cenderung mengarah pada sekularisasi, Indonesia dan banyak negara Asia lainnya justru menunjukkan ketahanan (*resiliensi*) agama dalam menghadapi arus urbanisasi. Agama tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat modern. Kondisi ini menegaskan bahwa keberagaman di kota tidak harus bertentangan dengan modernitas, melainkan dapat menjadi fondasi moral dan inklusi sosial dalam membangun kota yang adil, berkeadilan, dan berperadaban.

### ***Kelebihan dan Kekurangan***

Penelitian ini memiliki sejumlah kelebihan yang memperkuat nilai ilmiahnya. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yang komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis, keagamaan, dan urbanistik. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan, di mana setiap konteks sosial dan spasial memiliki narasi dan pengalaman yang beragam. Kedua, penelitian ini menampilkan analisis komparatif terhadap fenomena keagamaan antara Indonesia dan beberapa negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura.

Perbandingan ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana religiositas perkotaan di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam konteks global. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengadaptasi dan mengaitkan konsep *post-secular urbanism* ke dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada integrasi nilai-nilai spiritual dalam perencanaan dan pembangunan kota. Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi sosial yang tinggi karena membahas hubungan antara agama, moralitas publik, kohesi sosial, dan keadilan spasial yang merupakan aspek penting dalam menciptakan kehidupan kota yang inklusif, harmonis, dan berperadaban.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan utama terletak pada sifatnya sebagai penelitian berbasis kepustakaan (*library research*), sehingga tidak didukung oleh data empiris lapangan yang dapat memperkuat temuan secara faktual. Ruang lingkup geografis penelitian juga relatif terbatas, karena lebih berfokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, sementara dinamika keberagaman di kota-kota menengah dan kecil belum banyak dieksplorasi. Selain itu, penelitian ini belum memanfaatkan pendekatan kuantitatif seperti survei atau analisis statistik yang dapat mengukur tingkat religiositas, moralitas publik, atau kohesi sosial secara lebih objektif. Mengingat perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang sangat cepat di kawasan perkotaan, penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan menekankan konteks kontemporer, seperti pengaruh media sosial, globalisasi budaya, serta munculnya generasi baru masyarakat urban yang memiliki bentuk pengamalan agama berbeda dari generasi sebelumnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur, beberapa kesimpulan utama mengenai praktik keagamaan di komunitas perkotaan dapat ditarik. Pertama, urbanisasi dan modernisasi telah mengubah praktik keagamaan menjadi lebih individualistis, fleksibel, dan digital, serta memunculkan komersialisasi agama dan perpaduan nilai-nilai tradisional dan modern. Transformasi ini menunjukkan bagaimana masyarakat perkotaan menyesuaikan diri dengan gaya hidup modern, namun juga berpotensi menimbulkan praktik keagamaan yang bersifat superfisial.

Kedua, keragaman agama di kota menawarkan peluang untuk kerja sama lintas iman, namun juga menghadirkan tantangan seperti polarisasi sosial, segregasi, terbentuknya enclave keagamaan, serta stereotip antar kelompok. Keberhasilan koeksistensi sosial sangat bergantung pada kebijakan publik yang inklusif, peran tokoh agama, serta pendidikan multikultural dan literasi agama sejak dini.

Ketiga, identitas agama sering dimanfaatkan sebagai alat politik, yang dapat memperkuat eksklusivitas sosial dan menggeser peran agama dari perekat moral menjadi instrumen strategis. Strategi untuk mengatasinya mencakup penguatan literasi agama, dialog lintas iman, dan kolaborasi dalam kebijakan publik yang adil dan inklusif.

Keempat, ruang publik di kota modern berfungsi sebagai tempat ekspresi keagamaan dan dialog sosial. Penerapan konsep spiritual urban planning, yang mengintegrasikan kebutuhan spiritual dalam perencanaan kota, diyakini dapat memperkuat kohesi sosial, mengurangi potensi konflik identitas, dan menciptakan kota yang inklusif serta harmonis.

Kelima, dibandingkan dengan tren sekularisasi di negara Barat, komunitas urban di Indonesia dan Asia tetap menekankan peran agama dalam membentuk identitas sosial dan moralitas publik. Fenomena post-secular urbanism menunjukkan bahwa kota modern dapat menjadi ruang yang mendukung kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial.

Berdasarkan temuan ini, rekomendasi strategis meliputi integrasi nilai-nilai spiritual dalam kebijakan perencanaan kota, pemberdayaan lembaga keagamaan sebagai mitra pembangunan sosial, promosi pendidikan multikultural, serta penguatan kolaborasi lintas iman dalam proyek sosial dan ruang publik. Dengan demikian, agama dapat kembali berperan sebagai fondasi moral dan perekat sosial, sehingga keberagaman dipandang sebagai aset yang memperkaya kehidupan perkotaan, bukan sebagai sumber konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2021. "Agama, Media, Dan Masyarakat Urban. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press."
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Azisurrohman, Abdul, and Nur Rif'ah Hasaniy. 2025. "Melampaui Batas Fisik: Segregasi Sosial Dalam Kontestasi Ruang Keagamaan Perkotaan." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 3 (1): 13–26. <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v3i1.10363>.
- Beaumont, J., & Baker, C. 2011. "Postsecular Cities: Space, Theory and Practice. London: Continuum International Publishing Group."
- Campbell, H. A. 2013. "Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds. Routledge."
- Dwyer, C., Gilbert, D., & Shah, B. 2020. "Faith and Suburbia: Secularisation, Modernity and Place. Manchester: Manchester University Press."
- Harsanti, I. 2021. "Agama Dan Modernitas: Dinamika Keberagaman Masyarakat Urban Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish."
- Hasan, N. 2019. "Re-Islamisasi Di Indonesia Pasca Reformasi: Tren Baru Religiositas Perkotaan. *Studia Islamika*."
- Hasaniy, Nur Rif'ah, and Abdul Azisurrohman. 2024. "Beyond the Boundaries of Faith: A Multidimensional of Religious Spatial Segregation in the Context of Urban Society." *IAS Journal of Localities* 2 (2): 158–71. <https://doi.org/10.62033/iasjol.v2i2.76>.
- Heryanto, Ariel. 2014. "Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture." *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture*, 1–256. <https://doi.org/10.1355/sj31-1k>.
- Kamaruzzaman. 2017. "Agama Dan Konflik Sosial Di Perkotaan: Studi Tentang Kerukunan Dan Ketegangan Antarumat Beragama Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar."
- Kitiarsa, P. 2012. "Religiosity and Urban Modernity in Southeast Asia. Bangkok: Chulalongkorn University Press."
- Rambe, Toguan, and Seva Maya Sari. 2022. "Moderasi Beragama Di Kota Medan: Telaah Terhadap Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5 (2): 84. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i2.12630>.
- Vertovec, S. 2007. "Super-Diversity and Its Implications. *Ethnic and Racial Studies*, 30(6), 1024–1054."